

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak tujuh puluh empat tahun lalu telah berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa melalui amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kini memasuki alam revolusi digital 4.0, langkah menjadikan Indonesia *Smart* makin terfokus pada penguatan ekonomi melalui inovasi teknologi, pemerintahan berbasis digital, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang informasi teknologi (IT). Penguatan ekonomi digital dimulai pada peluncuran *Making* Indonesia 4.0 sebagai roadmap dan strategi menciptakan pertumbuhan ekonomi berdaya saing global, sedangkan pemerintahan berbasis digital merupakan adaptasi revolusi 4.0 yang sebelumnya telah dimulai dengan konsep *E-Government*.

Empat langkah strategis dalam *Making* Indonesia 4.0, diantaranya pemanfaatan teknologi *internet of things* dalam industri, penggunaan teknologi digital dan inovasi teknologi bagi industri kecil menengah (IKM) dan perindustrian nasional. Dengan kata lain, Indonesia *Smart* dalam Strategi/Road Map *Making* 4.0 adalah Bangsa yang mampu menghadapi tantangan 4.0 melalui digitalisasi ekonomi menuju daya saing global. Strategi/Roadmap *Making* Indonesia 4.0 tersebut akan sulit terwujud bila tidak diselaraskan dengan pemerintahan berbasis digital yang kemudian terkonsep dalam istilah *Smart Nation, Smart Province, Smart City, Smart Regency, dan Smart Village*.

Industri 4.0 menyediakan layanan cerdas secara terus menerus (real time) untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan penggunaan infrastruktur. Konsep ini sejalan dan dapat diterapkan pada konsep *Smart Nation/Indonesia (Smart Province/Smart City/Smart Village)* yang mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis digital. Smart Indonesia atau Indonesia cerdas secara umum dapat didefinisikan sebagai konsep pengelolaan provinsi/kota/kabupaten/desa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, kualitas hidup, dan perencanaan sumber daya alam (SDA) melalui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipatif. (Caragliu, Bo, & Nijkamp, 2009).

Saat pemerintah telah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0 dan mewujudkan Indonesia *Smart (Smart Province/Smart City/Smart Village)* dalam segala lini kehidupan, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Sangat disayangkan bila penerapan strategi industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini tentu saja harus didukung oleh peran para pengambil kebijakan, tata kelola, akses publik pada teknologi, manajemen risiko implementasi sistem, dan faktor keamanan sistem yang terimplementasikan dengan baik. Selain itu strategi mewujudkan Indonesia *Smart* ini juga harus didukung oleh sistem pendataan yang berintegritas dan terintegritas, payung hukum dan mekanisme perlindungan terhadap data pribadi, penetapan standar tingkat pelayanan, penetapan total harga/biaya kepemilikan sistem, penyusunan peta jalan strategis yang aplikatif

dan antisipatif, serta *design thinking* untuk menjamin keberlangsungan industri menuju Indonesia *Smart*.

Indonesia Smart (Smart Nation) terwujud ketika sebuah bangsa telah mengimplementasikan tahapan dan pengembangan kota cerdas (*Smart City*) baik itu di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. *Smart Province* sendiri adalah konsep pengimplementasian tata kelola pemerintahan level Provinsi berbasis digital/elektronik dimana Kota/ Kabupaten yang berada di bawah wilayah Provinsi tersebut telah mengimplementasikan *Smart City* bahkan *Smart Village* dalam layanan publiknya. Artinya *Smart Province* dapat dicapai jika seluruh komponen di dalamnya, mulai dari level kota/kabupaten sampai ke area terkecil desa/kompleks dapat bergerak dan berkolaborasi bersama. Untuk itulah diperlukan perencanaan/strategi komunikasi yang tepat agar implementasinya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel pada November 2017 lalu telah menyediakan payung hukum berupa Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi dan informatika yang dapat mendukung strategi Indonesia *Smart* di era digital 4.0. Ruang lingkup kebijakan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan, serta pengawasan *Sumsel Smart Province* yang menyelaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan Sumsel Smart Province di setiap OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dengan sistem informasi Pemerintah Pusat.

Ruang lingkup perencanaan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sumsel *Smart Province* dapat dipahami melalui Strategi percepatan pemanfaatan informasi dan teknologi melalui penyelenggaraan layanan *Sumsel Smart Province* dan pembangunan infrastruktur serta aplikasi. Pemerintah Provinsi Sumsel menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel sebagai penyelenggara/project Leader layanan, dan pengelola infrastruktur serta aplikasi.

Layanan Sumsel Smart Province meliputi pusat data (*data center*), pusat kendali (*command center*), *contact center*, *website* Pemerintah Provinsi dan *website* OPD, aplikasi dan basis data OPD, email resmi OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat Pemerintah Provinsi, Program *Sumsel Smart and Care* (S2C), dan fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan sebagai pengelola infrastruktur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi berfungsi menyediakan pusat data terintegrasi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung, mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi, menampilkan data dan informasi pada pusat kendali, dan memastikan aplikasi dan situs website Pemerintah Provinsi dan website OPD menggunakan nama *domain* dan *subdomain* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Salah satu layanan Sumsel *Smart Province* yang mendapat apresiasi Gubernur Sumsel periode 2014-2019 adalah pembangunan Sumsel Command Center (SCC) yang langsung dilaunching oleh Alex Noerdin pada 7 September 2018 lalu. SCC yang dibangun hanya enam bulan ini telah dilengkapi teknologi canggih yang dimanfaatkan untuk mendukung perhelatan Internasional Asian

Games di Palembang. Menurut Alex (Tribunnews, 7/9/2018) SCC merupakan salah satu terobosan yang membanggakan karena melalui SCC ini Provinsi seolah-olah ada dalam genggaman. Plt Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Inanda Karina juga mengatakan bahwa Sumsel Command Center (SCC) adalah langkah awal dari Provinsi Sumsel menuju konsep *Smart Province*. Sumsel *Smart Province* merupakan konsep pemanfaatan I.C.T (Information and Communication Technologies) dalam mendukung pengelolaan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif atau *good governance*.

Sumsel Command Center (SCC) ini mengintegrasikan layanan CCTV Pemerintah Provinsi Sumsel dan website seluruh OPD di Sumsel untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat dan disesuaikan tuntutan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan modern. Oleh karena itu, SCC bagi Pemerintah Provinsi Sumsel merupakan salah satu langkah strategis Sumsel Smart Province berupa layanan internal maupun eksternal dengan sistem yang responsif, efektif, dan modern.

Seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan Sumsel Command Center sebagai upaya untuk mewujudkan Sumsel Smart Province, penulis tertarik untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, terutama bagaimana upaya ini dapat menintegrasikan seluruh data, informasi, layanan dan aplikasi seluruh OPD Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel sesuai dengan fungsi Command Center (Pusat Kendali) yang termaktub dalam Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*.

Prof. Suhono Harso Supangkat dalam makalahnya yang berjudul “Smart Province” pada 22 Februari 2018 menjelaskan bahwa *Command Center/Command Room/Operation Room* adalah bentuk untuk melakukan proses pemahaman terhadap kondisi daerah. Namun, pemanfaatan teknologi saja tidak cukup, tetapi juga harus disertai dengan tata kelola dan sumber daya manusia yang turut mendukung dan dikerjakan secara holistik. Untuk itulah peneliti juga akan mengidentifikasi akar masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sumsel Command Center dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah mengingat telah satu tahun berjalan, Sumsel command center belum berfungsi sebagai Pusat Data dan informasi provinsi dan Kota/Kabupaten, Pusat operasional harian, Pusat Kendali Kedaruratan, dan Kendali multi domain.

Dengan demikian, strategi/upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumsel menuju Sumsel *Smart Province* perlu upaya strategis baik dalam tataran perencanaan dan implementasi. Karenanya, penelitian ini diberi judul, “ Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Provinsi *Smart* (Studi Kasus Penyelenggaraan Sumsel Command Center).”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, maka peneliti memaparkan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah (Kabupaten/kota) dalam mewujudkan Sumsel Smart Province, terutama dukungan terhadap optimalisasi Sumsel Command Center masih belum optimal;
2. Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pelayan Publik dan fasilitator pemerintah dengan masyarakat, dan pengguna IT, serta perencana komunikasi dan informatika masih minim;
3. Sarana, Prasarana dan dana pendukung yang terbatas;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang masih kabur;
5. Inovasi dan kolaborasi yang belum terfokus dan intens;
6. Minimnya Partisipasi masyarakat .

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel mewujudkan Provinsi Smart melalui layanan Sumsel Command Center?
2. Apa strategi komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel mewujudkan Provinsi Smart ?

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis Strategi Komunikasi dan menawarkan strategi komunikasi yang sesuai dalam penyelenggaraan Sumsel Command Center sebagai layanan Sumsel Smart Province yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu upaya mewujudkan Provinsi Smart. Objek penelitian adalah Strategi Komunikasi dan identifikasi masalah dalam penyelenggaraan Sumsel Command Center sebagai Pusat Layanan data, informasi, dan aplikasi , sementara subjek penelitian adalah Kementerian Kominfo RI, Sekretaris Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Diskominfo Provinsi Sumsel yang membidangi urusan Pengelolaan Informasi Publik, E-Government, Statistik dan TIK& Persandian, DPRD Prov. Sumsel, Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo Kab/Kota serta akademisi.

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari paparan diatas adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menawarkan strategi Komunikasi dalam penyelenggaraan Sumsel command center sebagai pusat layanan data, informasi, dan aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumsel Sebagai Smart Province.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah kelilmuan di bidang Ilmu Komunikasi.
  - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Provinsi Smart melalui optimalisasi Sumsel Command Center sebagai Pusat Layanan Data, Informasi, dan Aplikasi.